

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BEKASI MENURUT PENGELUARAN

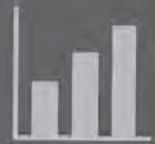
2019-2023



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BEKASI
MENURUT PENGELUARAN**

2019-2023

<https://bekasikota.bps.go.id>



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BEKASI
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023**

ISBN: -

Nomor Publikasi: 32750.240003

Katalog BPS: 9302020.3275

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah halaman: vi + 35 halaman

Naskah:

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Infografis:

www.freepik.com

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Dicetak Oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN/COMPILERS

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BEKASI MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

Volume VIII, 2024

Pengarah/Director

Ari Setiadi Gunawan, S.H.

Penanggungjawab/Person in Charge

Ari Andriani, S.ST.

Penyunting/Editor

Ari Andriani, S.ST.

Shabrina Izzati, S.ST.

Catur Putra Prakoso Pamungkas, S.ST.

Pengolah Data dan Penulis naskah/Data Processing and Authors

Qonnita Silvia Makrufa, S.ST.

Penata Letak/Layout Designers

Shabrina Izzati, S.ST.

Catur Putra Prakoso Pamungkas, S.ST.

<https://bekasiregional.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 ini merupakan seri publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi yang menyajikan tinjauan deskriptif tentang perekonomian Kota Bekasi. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

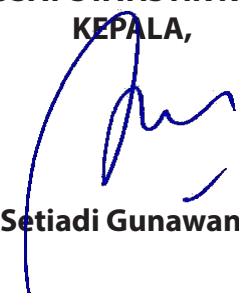
Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah).

Untuk mempermudah akses untuk pengguna publikasi ini bisa diunduh melalui website BPS Kota Bekasi (www.kotabekasi.bps.go.id) tanpa berbayar. Website tersebut juga menyediakan fitur tabel dinamis yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh data yg sesuai dengan kebutuhannya.

Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga data yang disajikan bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, peneliti, dunia akademis, kalangan bisnis maupun para pengguna yang lain.

Bekasi , April 2024

**BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BEKASI
KEPALA,**



Ari Setiadi Gunawan, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	1
1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB	3
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT).....	7
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT).....	8
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)	9
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	11
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)	12
2.6 EKSPOR - IMPOR	14
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BEKASI MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2019-2023	15
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	15
3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN	20
3.2.1. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	20
3.2.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT.....	24
3.2.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH.....	25
3.2.4. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO.....	27
3.2.5. PERUBAHAN INVENTORI.....	28
3.2.6. NET EKSPOR.....	29
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019-2023.....	15
Tabel 2.	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019-2023.....	16
Tabel 3.	Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019 - 2023	17
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019-2023.....	18
Tabel 5.	Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019-2023	19
Tabel 6.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kota Bekasi 2019-2023.....	21
Tabel 7.	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kota Bekasi 2019-2023	22
Tabel 8.	Pertumbuhan Riil Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kota Bekasi 2019-2023	23
Tabel 9.	Pertumbuhan Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kota Bekasi 2019- 2023	24
Tabel 10.	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT, Kota Bekasi 2019-2023	25
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kota Bekasi 2019-2023.....	26
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur PMTB, Kota Bekasi 2019-2023.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi, 2019-2023	33
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi, 2019-2023	34
Tabel 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi, 2019-2023	35
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi, 2019-2023.....	36

<https://bekasikota.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses Produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

³ - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
 - Disebut sebagai pendekatan “riil”
 - Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat terntang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat beengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kota Bekasi menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya beangaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah beendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Teilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini beangaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembanguan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured/ FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

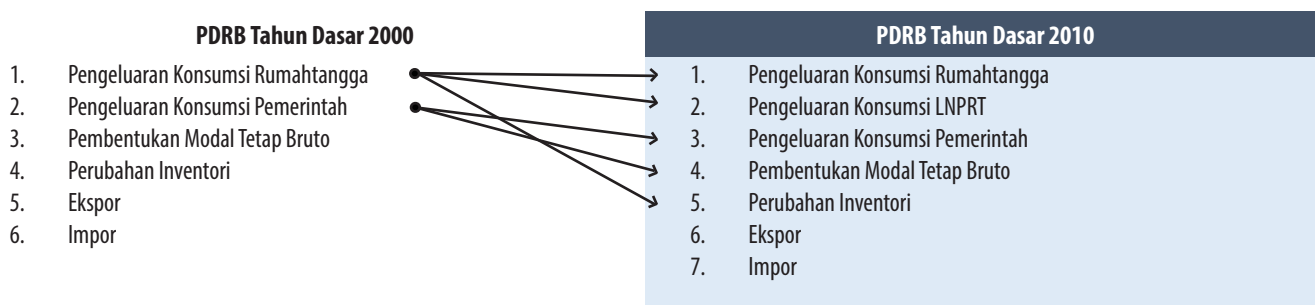
- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010



BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas (untuk PK-RT Tahunan);
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan);
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota Bekasi;
7. Nilai PK-RT atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil up-dating direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota Bekasi;
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga beeran sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumahtangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah beeran sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak teisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, peustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kota Bekasi mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PK-P Kota Bekasi mencakup: a). PK-P yang ada di wilayah Kota Bekasi; b). PK-P Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari PK-P Kota Bekasi; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kota Bekasi

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kota Bekasi tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P Kota Bekasi Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output-Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output BI

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Kota Bekasi
Social Transfer in kind	IHK umum	Kota Bekasi
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii. Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi

iv. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS

- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v. Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

√ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

√ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply :

PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi :

PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (work in progress), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (material & supplies), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

- a. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
- c. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri teilih;
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) teilih;
- h. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan

v. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. **Metoda Revaluasi**

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = $\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$

PI atas dasar harga Konstan = $\text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$

b. **Metode Deflasi**

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = $\text{Inventori (t) atas dasar harga berlaku} / \text{IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB (t-1)}$

PI atas dasar harga Berlaku = $\text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$

2.6 EKSPOR - IMPOR

i. **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii. **Konsep dan Definisi**

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii. **Cakupan**

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah Kota Bekasi terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar Kota Bekasi
- b. Impor dari luar Kota Bekasi.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv. **Sumber Data**

Nilai ekspor-impor wilayah Kota Bekasi didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kota Bekasi diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BEKASI MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2019-2023

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku di tahun 2023 meningkat, yakni dari 98,11 triliun rupiah (2019) menjadi 118,96 triliun rupiah (2023). Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010, juga mengalami peningkatan, yakni dari 69,40 triliun rupiah (2019) menjadi 77,24 triliun rupiah (2023). Hal ini menunjukkan, secara riil ekonomi Kota Bekasi selalu mengalami pertumbuhan. Selama periode 2019-2023, pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi berturut-turut sebesar 5,41 persen, minus 2,58 persen, 3,22 persen, 4,96 persen, dan 5,43 persen.

Nilai PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Bekasi pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019-2023

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	110.686,27	109.145,58	112.770,63	121.706,69	130.955,10
2. Konsumsi LNPRT	330,39	324,81	336,91	355,72	395,46
3. Konsumsi Pemerintah	4.543,48	4.564,29	4.720,20	4.862,80	5.066,02
4. PMTB	36.411,64	33.256,33	35.543,68	37.125,99	40.354,63
5. Perubahan Inventori	3.805,76	1.617,12	(992,24)	206,00	202,68
6. Net Ekspor	(57.669,85)	(52.415,86)	(50.995,82)	(54.375,84)	(58.010,87)
Total PDRB	98.107,69	96.492,28	101.383,36	109.881,37	118.963,02

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Pada periode tahun 2019-2023 PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku, yakni sebesar 98,11 triliun rupiah (2019); 96,49 triliun rupiah (2020); 101,38 triliun rupiah (2021); 109,88 triliun rupiah (2022) dan 118,96 triliun rupiah (2023). Terjadi penurunan nilai PDRB di tahun 2020 yaitu sekitar 1,6 triliun rupiah akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi yang dapat dilihat dari menurunnya konsumsi rumah tangga, terhambatnya investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan juga penurunan di komponen pengeluaran PDRB lainnya.

Pada tahun 2021, angka Covid-19 mulai mengalami penurunan dan perbaikan di berbagai sektor. Perekonomian di Kota Bekasi pun mulai mengalami peningkatan pada tahun 2021. PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mengalami kenaikan, yakni menjadi 101,38 triliun rupiah. Setelah itu, PDRB atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan menjadi 109,88 triliun rupiah (2022) dan 118,96 triliun rupiah (2023).

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan volume permintaan atau konsumsi akhir. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kota Bekasi pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019-2023

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	77.285,88	74.734,61	76.101,19	79.231,54	82.154,93
2. Konsumsi LNPRT	225,63	216,68	220,64	229,25	252,13
3. Pemerintah	2.757,71	2.729,87	2.751,55	2.747,93	2.833,65
4. PMTB	24.667,90	22.398,37	23.406,33	23.811,3	25.264,16
5. Perubahan Inventori	2.293,44	970,75	(561,29)	115,56	110,06
6. Net Ekspor	(37.824,04)	(33.431,05)	(32.121,48)	(32.874,93)	(33.373,15)
Total PDRB	69.406,53	67.619,24	69.796,93	73.260,65	77.241,78

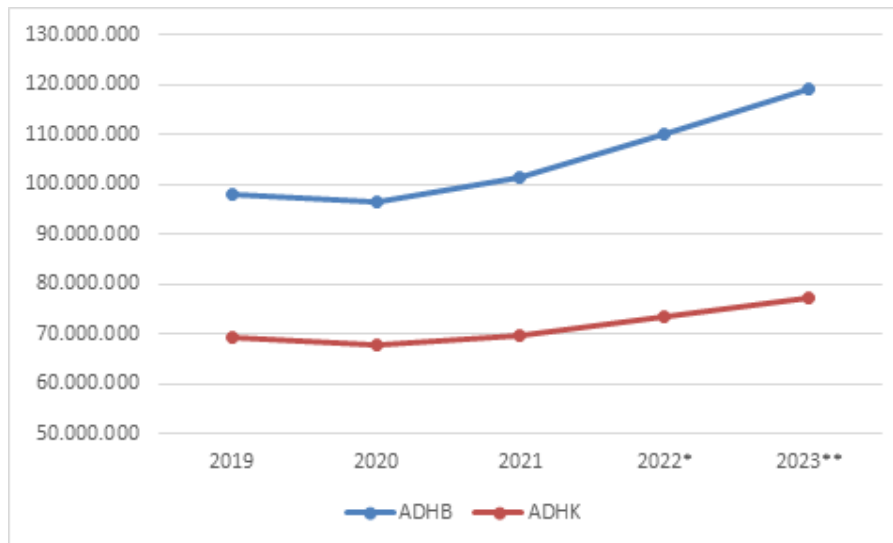
* *Angka sementara/Preliminary Figures*

** *Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kota Bekasi terjadi penurunan sebesar 1,79 triliun rupiah di tahun 2020 dengan nilai PDRB total ADHK yaitu 67,62 triliun rupiah. Namun, kemudian mengalami kenaikan lagi menjadi 69,79 triliun rupiah pada tahun 2021; 73,26 triliun rupiah pada tahun 2022; dan 77,24 triliun rupiah pada tahun 2023 seiring dengan perbaikan segala bidang setelah pandemi Covid-19.

Sedangkan dari Grafik 1, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan.

Grafik 1. Perbandingan PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019-2023



* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2019-2023 distribusi terbesar PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan komponen pengeluaran di Kota Bekasi adalah konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2019, PDRB yang dihasilkan di Kota Bekasi digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 112,82 persen. Besaran ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kenaikan. Sehingga pada tahun 2023 persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 110,08 persen. Penurunan persentase distribusi konsumsi rumah tangga menunjukkan, semakin meningkatnya proporsi komponen pengeluaran lain terhadap PDRB.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019 - 2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	112,82	113,11	111,23	110,76	110,08
2. Konsumsi LNPRT	0,34	0,34	0,33	0,32	0,33
3. Pemerintah	4,63	4,73	4,66	4,43	4,26
4. PMTB	37,11	34,47	35,06	33,79	33,92
5. Perubahan Inventori	3,88	1,68	(0,98)	0,19	0,17
6. Net Ekspor	(58,78)	(54,32)	(50,30)	(49,49)	(48,76)
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Gambaran PDRB Kota Bekasi menurut pengeluaran pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya yang dihasilkan di Kota Bekasi masih belum mampu untuk memenuhi konsumsi rumah tangga ditambah lagi untuk konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Hal ini dapat dilihat dari angka Net ekspor yang selalu negatif.

Selain konsumsi rumah tangga, pengeluaran dalam bentuk PMTB juga mempunyai peranan yang cukup besar, selama periode 2019-2023 besaran pengeluaran untuk komponen PMTB cukup fluktuatif, mulai dari 37,11 persen pada tahun 2019. Di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 34,47 persen karena Pandemi Covid-19 menurunkan investasi baik asing maupun domestik, pemerintah juga mengalihkan anggaran untuk pembangunan ke penanganan Covid-19 dan kesehatan. Namun pada tahun 2021 PMTB mulai mengalami kenaikan dan menurun kembali pada 2022, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2023. Presentase PDRB tahun 2023 menjadi 33,92 persen.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 4, selama periode tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yakni sebesar 5,41 persen (2019); minus 2,58 persen (2020); 3,22 persen (2021); 4,96 persen (2022); dan 5,43 persen (2023).

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019-2023

(Persen)

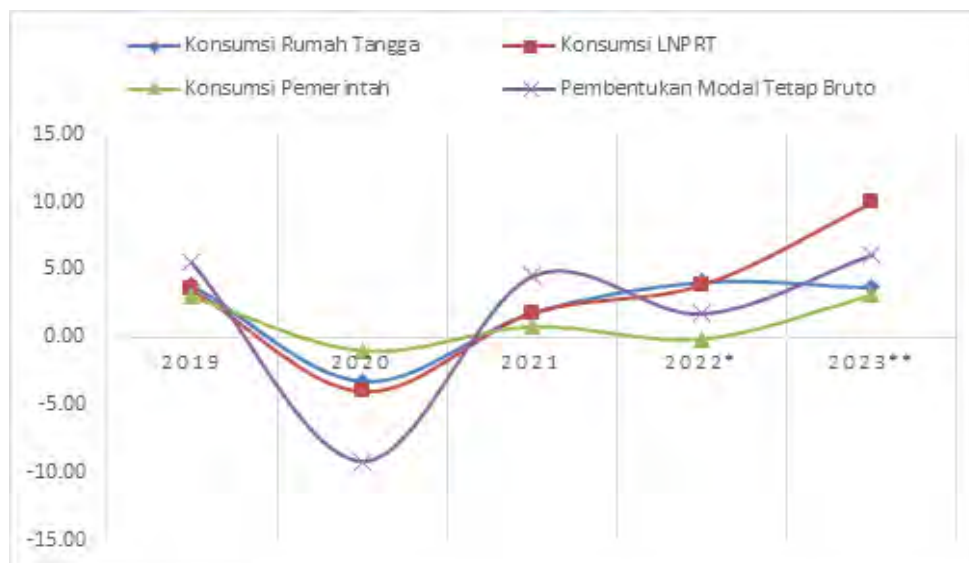
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,90	-3,30	1,83	4,11	3,69
2. Konsumsi LNPRT	3,55	-3,97	1,83	3,90	9,98
3. Pemerintah	2,99	-1,01	0,79	-0,13	3,12
4. PMTB	5,48	-9,20	4,50	1,73	6,10
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Total PDRB	5,41	-2,58	3,22	4,96	5,43

* *Angka sementara/Preliminary Figures*

***Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Grafik 2 menunjukkan pertumbuhan masing-masing komponen PDRB Menurut Pengeluaran selama periode 2019-2023. Pertumbuhan di semua komponen mengalami kenaikan pada tahun 2021. Kenaikan tersebut dikarenakan perbaikan di berbagai sektor ekonomi setelah menurunnya angka Pandemi Covid-19 yang menggoyahkan pertumbuhan ekonomi pada 2020. Sementara, pada tahun 2023 konsumsi pemerintah dan PMTB mengalami peningkatan, yaitu sebesar 3,12 persen dan 6,10 persen.

Grafik 2. Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019 – 2023 (Persen)



Jika dirinci menurut komponen pengeluaran pada tahun 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan 3,69 persen, pertumbuhan konsumsi LNPRT mengalami kenaikan 9,98 persen, pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami penurunan 3,12 persen, dan pertumbuhan PMTB mengalami kenaikan 6,10 persen.

Tabel 5. Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,31	1,97	1,47	3,66	3,77
2. Konsumsi LNPRT	3,24	2,37	1,86	1,62	1,08
3. Konsumsi Pemerintah	1,26	1,48	2,60	3,16	1,03
4. PMTB	3,11	0,59	2,28	2,68	2,45
5. Net Ekspor	-	-	-	-	-
Total PDRB	2,30	0,95	1,79	3,26	2,68

* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Laju indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor dan impor. Dari Tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2019–2023, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

⁵ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Bekasi untuk periode 2019–2023.

3.2.1. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bekasi ternyata masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Bekasi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 11 (sebelas) kelompok COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), yaitu kelompok makanan dan minuman non alkohol; minuman beralkohol dan rokok; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; perabot dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan; pendidikan; angkutan/transportasi; komunikasi; rekreasi dan budaya; penyediaan makan minum dan penginapan; serta kelompok barang pribadi dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019-2023 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Selama periode 2019-2023 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB selalu melebihi 100 persen. Pada tahun 2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 112,82 persen di tahun 2019. Selanjutnya menjadi 113,11 persen (2020) dan 111,23 persen (2021), dan menurun menjadi 110,76 persen (2022) dan terus menurun pada tahun 2023 menjadi 110,08.

Dilihat distribusi persentasenya, kontribusi konsumsi rumah tangga tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan komponen lain seperti PMTB mengalami peningkatan kontribusi. Investasi setelah menurunnya angka pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, beberapa penyebabnya adalah peningkatan pembangunan pada berbagai aspek di Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kota Bekasi 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	110.686,27	109.145,58	112.770,63	121.706,69	130.955,10
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	77.285,88	74.734,61	76.101,19	79.231,54	82.154,93
Proporsi terhadap PDRB (% Atas Dasar Harga Berlaku)	112,82	113,11	111,23	110,76	110,08
Rata-rata Konsumsi per Kapita/Tahun (Ribu)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	37.603,75	43.036,42	43.913,42	46.845,02	49.845,75
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	26.256,55	29.468,08	29.634,16	30.496,29	31.270,82
Pertumbuhan[1] (%)					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	3,90	-3,30	1,83	4,11	3,69

Sumber data jumlah penduduk tahun 2019 : SUPAS 2015

Sumber data jumlah penduduk tahun 2020-2023 :Proyeksi Penduduk Interim

* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19 konsumsi rumah tangga mengalami penurunan yaitu minus 3,30 persen. Konsumsi yang menurun ini pun disebabkan oleh faktor pendapatan rumah tangga yang mengalami penurunan. Sejumlah perusahaan tutup karena diberlakukannya sistem PSBB ketat selama hampir tiga bulan, dan berdampak masif hampir di seluruh sektor lapangan usaha. Institusi rumah tangga pun cenderung menahan dan mengubah perilaku atau pola konsumsinya. Namun, pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan sebesar 1,83 persen dan meningkat menjadi 4,11 persen pada tahun 2022, kemudian melambat menjadi 3,69 persen.

Peningkatan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga terjadi seiring dengan perbaikan ekonomi karena menurunnya pandemi Covid-19. Konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK 2010) sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk.

Di sisi lain, sebelum pandemi Covid-19 kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Adapun struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kota Bekasi 2019-2023*(Persen)*

No	Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Makanan, minuman, dan rokok	27,76	29,71	29,78	30,45	30,46
2	Pakaian dan Alas Kaki	3,74	3,58	3,54	3,44	3,33
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,13	12,51	12,40	12,22	11,83
4	Kesehatan dan Pendidikan	3,90	4,11	4,23	4,06	3,95
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	32,50	29,88	29,61	30,02	30,63
6	Hotel & Restoran	15,71	15,63	15,80	15,23	15,33
7	Lainnya	4,27	4,57	4,64	4,58	4,47
Total Konsumsi Rumah Tangga		100	100	100	100	100

* *Angka sementara/Preliminary Figures*** *Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Pola proporsi konsumsi pada Tabel 7 menunjukkan pergeseran yang relatif kecil antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan, dan meningkat pada konsumsi makanan pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2023, konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan distribusi persentase yaitu konsumsi makanan, minuman dan rokok; dan konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya; dan hotel & restoran. Sedangkan pengeluaran RT yang mengalami penurunan kontribusi yaitu, konsumsi pakaian & alas kaki; kesehatan & pendidikan; perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kota Bekasi 2019-2023*(Persen)*

No	Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Makanan, minuman, dan rokok	5,58	3,53	1,64	4,77	3,27
2	Pakaian dan Alas Kaki	4,96	-8,35	0,95	1,70	1,81
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,55	0,81	1,21	2,94	2,97
4	Kesehatan dan Pendidikan	6,68	0,82	4,65	1,20	0,73
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,18	-8,44	1,96	5,22	4,19
6	Hotel & Restoran	3,59	-5,06	1,58	3,54	5,60
7	Lainnya	3,08	-0,74	2,72	2,85	1,20
Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga		3,90	-3,30	1,83	4,11	3,69

** Angka sementara/Preliminary Figures****Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Dilihat dari pertumbuhan riil nya, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kelompok makanan dan minuman mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 pertumbuhannya melambat dibanding tahun 2019 tetapi tidak mengalami kontraksi. Selanjutnya terus mengalami pertumbuhan yang positif namun mengalami perlambatan kembali pada tahun 2023, yaitu menjadi sebesar 3,27 persen.

Sementara, jika dilihat untuk keseluruhan konsumsi rumah tangga. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kontraksi dan pertumbuhan yang negative menjadi minus 3,30 persen. Pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan menjadi 1,83 persen hingga 3,69 persen pada tahun 2023.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kota Bekasi 2019-2023

(Persen)

No	Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Makanan, minuman, dan rokok	5,74	1,96	1,89	5,34	4,20
2	Pakaian dan Alas Kaki	6,32	3,13	1,24	2,99	2,25
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,12	0,89	1,15	3,34	1,14
4	Kesehatan dan Pendidikan	5,97	3,19	1,48	2,39	4,09
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	0,47	-0,98	0,42	3,97	5,41
6	Hotel & Restoran	3,67	3,36	2,80	0,47	2,57
7	Lainnya	4,88	6,24	2,21	3,65	3,65
Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga		3,31	1,97	1,47	3,66	3,77

* *Angka sementara/Preliminary Figures*

** *Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9 menunjukkan peningkatan untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kumulatif peningkatan harga dari tahun 2019-2023 sebesar 14,18 persen. Di tahun 2023, kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya mengalami kenaikan tertinggi dengan pertumbuhan indeks implisit sebesar 5,41 persen. Untuk kelompok makanan, minuman, dan rokok laju implisitnya sebesar 4,20 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan kenaikan harga terendah pada tahun 2023 terjadi pada perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga sebesar 1,14 persen.

3.2.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT, Kota Bekasi 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (Miliar)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	330,39	324,81	336,92	355,72	395,46
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	225,63	216,68	220,64	229,25	252,13
Proporsi terhadap PDRB					
(% Atas Dasar Harga Berlaku)	0,34	0,34	0,33	0,32	0,33
Pertumbuhan (% ADHK)	3,55	(3,97)	1,83	3,90	9,98

* *Angka sementara/Preliminary Figures*

** *Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Peranan konsumsi LNPRT dalam PDRB Menurut Pengeluaran di Kota Bekasi sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Pada tahun 2019 konsumsi LNPRT sebesar 330,39 miliar (2019); 324,81 miliar (2020); 336,92 miliar (2021); 355,72 miliar (2022); dan 395,46 miliar (2023). Pandemi Covid-19 juga berimbas pada lembaga non profit, banyak LNPRT yang berhenti melakukan kegiatan sosial karena PSBB, laju pertumbuhan LNPRT minus hingga 3,97 persen (2020) dan mulai meningkat menjadi 1,83 (2021), kemudian 3,90 persen (2022), dan meningkat pesat pada tahun 2023 sebesar 9,98 persen seiring dengan dilaksanakannya persiapan pemilu pada awal tahun 2024.

3.2.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kota Bekasi 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (<i>Miliar</i>)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	4.543,48	4.564,29	4.720,21	4.862,80	5.066,02
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	2.757,72	2.729,87	2.751,55	2.747,93	2.833,65
Proporsi terhadap PDRB					
(% Atas Dasar Harga Berlaku)	4,63	4,73	4,66	4,43	4,26
Konsumsi Pemerintah per Kapita/Tahun (<i>Ribu</i>)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	1.486,03	1.799,71	1.838,07	1.871,69	1.928,29
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	913,30	1.076,39	1.071,47	1.057,68	1.078,58
Pertumbuhan[1] (%)					
a. Total Konsumsi Pemerintah	2,99	-1,01	0,79	-0,13	3,12

* *Angka sementara/Preliminary Figures*

** *Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 4,54 triliun rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 4,56 triliun rupiah (2020); 4,72 triliun rupiah (2021); dan 4,86 triliun rupiah (2022), dan 5,06 triliun rupiah.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga terus mengalami penurunan dari 4,73 persen pada tahun 2020 hingga menjadi 4,26 persen di tahun 2023. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah perkapita. Peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1,48 juta, hingga mencapai 1,92 juta pada tahun 2023.

3.2.4. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data pada Tabel 12 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019–2023 berfluktuasi, pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai besaran hingga 6,10 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar minus 9,20 persen.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam PMTB selama tahun 2019–2023 yaitu pada kisaran 88–89 persen. Proporsi bangunan tertinggi pada tahun 2020 yaitu 89,49 persen. Sedangkan proporsi non bangunan terbesar pada tahun 2022 yaitu 11,58 persen.

Investasi baik bangunan dan non bangunan mengalami pertumbuhan yang turun secara signifikan pada 2020. Pertumbuhan PMTB bangunan minus 8,73 persen sedangkan PMTB non bangunan minus 13,24 persen. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan investasi baik fisik maupun non fisik, dari dalam maupun dari luar negeri. Perusahaan berusaha untuk bisa survive di era pandemi ini, dan memfokuskan pengeluaran untuk bisa tetap menggaji karyawan, biaya produksi dan faktor produksi lainnya serta penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga mengesampingkan pengeluaran untuk berinvestasi untuk sementara waktu.

Kemudian pada tahun 2021 dan 2022, PMTB mulai mengalami laju pertumbuhan positif yaitu 4,50 persen (2021); 1,73 persen (2022); dan 6,10 persen pada tahun 2023 seiring dengan perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

⁶ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB, Kota Bekasi 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (<i>Miliar</i>)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	36.411,65	33.256,33	35.543,68	37.125,99	40.354,53
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	24.667,90	22.398,37	23.406,33	23.811,3	25.264,16
Proporsi terhadap PDRB (% Atas Dasar Harga Berlaku)	37,11	34,47	35,06	33,79	33,92
Struktur PMTB[1]					
a. Bangunan (<i>Miliar</i>)	32.428,20	29.761,38	31.720,86	32.826,79	35.826,15
(%)	89,06	89,49	89,24	88,42	88,78
b. Non-bangunan (<i>Miliar</i>)	3.983,45	3.494,95	3.822,82	4.299,20	4.528,48
(%)	10,94	10,51	10,76	11,58	11,22
Total PMTB (<i>Miliar</i>)	36.411,65	33.256,33	35.543,68	37.125,99	40.354,53
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan[2] (%)					
a. Bangunan	6,70	(8,73)	4,14	0,81	6,72
b. Non-bangunan	(3,89)	(13,24)	7,74	9,70	1,16
Total PMTB	5,48	(9,20)	4,50	1,73	6,10

* *Angka sementara/Preliminary Figures*

***Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

3.2.5. PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan Perubahan Inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi, ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini dapat berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya dapat memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila Perubahan Inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen Perubahan Inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

3.2.6. NET EKSPOR

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor impor antar kabupaten menjadikan komponen ini (dalam *series* PDRB atas dasar harga konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut Pengeluaran dengan total PDRB menurut Lapangan Usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok, yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan Perubahan Inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki dua (angka), positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "positif" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

<https://bekasikota.bps.go.id>

BAB IV

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019-2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Bekasi pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019-2023, sehingga mudah menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output.

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi, 2019-2023

(Juta Rupiah)

Komponen	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	110.686.272,48	109.145.581,10	112.770.629,87	121.706.698,91	130.955.101,80
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani rumah Tangga	330.391,84	324.813,38	336.916,19	355.716,19	395.462,06
3. Konsumsi Pemerintah	4.543.481,63	4.564.293,62	4.720.206,99	4.862.804,00	5.066.020,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	36.411.645,06	33.256.329,60	35.543.679,10	37.125.993,00	40.354.630,89
5. Perubahan Inventori	3.805.761,09	1.617.116,95	(992.245,65)	206.004,00	202.682,05
6. Net Ekspor	(57.669.854,33)	(52.415.856,09)	(50.995.825,83)	(54.375.840,00)	(58.010.878,02)
Produk Domestik Regional Bruto	98.107.697,77	96.492.278,57	101.383.360,68	109.881.376,10	118.963.019,22

* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi, 2019-2023

(Juta Rupiah)

Komponen	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	77.285.878,78	74.734.613,60	76.101.187,73	79.231.539,15	82.154.929,34
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani rumah Tangga	225.630,59	216.684,29	220.644,64	229.250,39	252.131,92
3. Konsumsi Pemerintah	2.757.715,97	2.729.872,08	2.751.548,26	2.747.930,29	2.833.653,39
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	24.667.902,16	22.398.368,71	23.406.334,67	23.811.300,64	25.264.161,44
5. Perubahan Inventori	2.293.444,38	970.748,08	(561.298,36)	115.556,00	110.058,23
6. Net Ekspor	(37.824.041,48)	(33.431.048,11)	(32.121.481,10)	(32.874.926,47)	(33.373.147,83)
Produk Domestik Regional Bruto	69.406.530,40	67.619.238,66	69.796.935,84	73.260.650,00	77.241.786,49

* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

<https://bekasikota.bps.go.id>

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi, 2019-2023

(Juta Rupiah)

Komponen	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	112,82	113,11	111,23	110,76	110,08
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani rumah Tangga	0,34	0,34	0,33	0,32	0,33
3. Konsumsi Pemerintah	4,63	4,73	4,66	4,43	4,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,11	34,47	35,06	33,79	33,92
5. Perubahan Inventori	3,88	1,68	-0,98	0,19	0,17
6. Net Ekspor	-58,78	-54,32	-50,30	-49,49	-48,76
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

<https://bekasikota.bps.go.id>

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi, 2019-2023

(Juta Rupiah)

Komponen	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,90	-3,30	1,83	4,11	3,69
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani rumah Tangga	3,55	-3,97	1,83	3,90	9,98
3. Konsumsi Pemerintah	2,99	-1,01	0,79	-0,13	3,12
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,48	-9,20	4,50	1,73	6,10
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	5,41	-2,58	3,22	4,96	5,43

* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

<https://bekasikota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BEKASI**

Jl. Rawa Tembaga No.6 ,17141
Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi
Telp : 021-88953987
Email : bps3275@bps.go.id
web : <http://bekasi.kota.bps.go.id>